

# Jasa Marga Kaji Kelayakan Tol Kaltim

Oleh Eko Adityo Nugroho

► JAKARTA – PT Jasa Marga Tbk tengah mengkaji kelayakan jalan tol Samarinda-Balikpapan, Kalimantan Timur, sebelum proyek tersebut dikonstruksi. Kajian ini diharapkan dapat segera tuntas sebelum akhir tahun ini.

Sekretaris Perusahaan Jasa Marga David Wijayatno menuturkan, beberapa aspek yang dikaji di antaranya mengenai desain, trase, potensi jumlah kendaraan yang akan melintas, tarif, dan kebutuhan dana pembangunan jalan bebas hambatan itu. "Kami masih kaji dan diharapkan semester II-2013 ini sudah selesai," ujar dia sesuai sosialisasi mengatasi kemacetan di tol dalam kota, di Jakarta, Senin (11/3).

Dia mengakui, pihaknya belum secara resmi mengerjakan jalan tol tersebut karena belum ada kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Kaltim sebagai inisiator proyek. Namun begitu, perseroan siap bekerja sama apabila inisiator memintanya untuk mengerjakan jalan tol sepanjang 99,02 kilometer tersebut.

Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek pernah mengungkapkan, Menteri BUMN Dahlan Iskan telah menyampaikan secara lisan bahwa Jasa Marga akan mengerjakan pembangunan jalan tol ini. Bahkan, pembicaraan intensif akan dilakukan secepatnya untuk membahas kelayakan jalan tol ini.

Dia menambahkan, Pemprov Kaltim sudah mengucurkan dana sebesar Rp 2 triliun untuk pembangunan jalan tol termasuk pembebasan lahan. Proses pembebasan lahan diharapkan bisa tuntas pada tahun ini. Adapun total nilai investasi proyek infrastruktur ini mencapai Rp 6,2 triliun.

Pembangunan jalan tol ini direncanakan terbagi dalam lima paket pengerjaan. Paket pertama adalah jalan yang menghubungkan KM 13 Balikpapan-Semboja senilai Rp 374 miliar, KM 13 Balikpapan-Manggar (Rp 373 miliar), Semboja-Palaran (Rp 366 miliar), Palaran-Mahkota II (Rp 363 miliar), dan KM 13 Balikpapan-Sepingan (Rp 373 miliar).

Proyek ini rencananya mulai dilaksanakan pada 2010 hingga tahap akhir penyelesaian pada 2013. Namun, hingga kini jalan itu belum dibangun menyusul belum rampungnya pembebasan lahan di kawasan Taman

Hutan Rakyat Bukit Soeharto.

Dihubungi terpisah, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Achmad Gani Ghazali mengakui, pembangunan proyek jalan tol Samarinda-Balikpapan terkendala oleh pembebasan lahan di kawasan hutan lindung tersebut. Di samping itu, jalan tol ini juga belum layak secara finansial, meski inisiator telah membangun sebagian ruas jalan untuk meningkatkan kelayakan finansial. "Karena itu, dia minta dukungan dana dari APBN. Ini yang belum keluar," ujar Gani, baru-baru ini.

Pembebasan lahan yang melewati hutan lindung itu, papar Gani, harus diselesaikan terlebih dahulu dengan meminta izin kepada Kementerian Kehutanan. Izin itu tidak mudah karena

aturan Kementerian Kehutanan menyebutkan tidak bisa membangun di kawasan hutan lindung.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa sebelumnya meminta sejumlah badan usaha milik negara, termasuk Jasa Marga untuk menangani pembangunan jalan tol di Kalimantan. Bahkan sejumlah jalan tol yang sangat prioritas dan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat akan ditugaskan kepada BUMN.

"Kalau ada satu proyek dalam infrastruktur sangat prioritas yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, kami beri penugasan, karena swasta tidak berminat, APBN tidak ada dana. Kami beri penugasan BUMN untuk bangun. Lebih long term, panjang. Nanti (BUMN) bisa lakukan pelepasan setelah itu terbangun," kata Hatta, baru-baru ini.

Penggarapan jalan tol Samarinda-Balikpapan merupakan tahap awal pembangunan jalur trans Kalimantan Timur. Nantinya Kalimantan Timur ingin melanjutkan pembangunan jalan tol Sangata-Maloy (130 km), Bontang-Sangata (40 km), Samarinda-Bontang (84 km), dan penyelesaian proyek Jembatan Pulau Balang (1,5 km).

